

ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN, DAN PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Novi Ayularasati¹, Normajatun², Fakhsiannor³

¹Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 16120171

²Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1116116301

³Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1120106301

Email: Noviayularasati@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui PenerapanSIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara kepada tiga orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan PenerapanSIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin yang harus diperbaiki kedepnya

Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Elemen Sukses Pengembangan E-Government

ABSTRACT

The research objective was to find out the application of SIMPEG in BKD Diklat Kota Banjarmasin and to find out the supporting and inhibiting factors in application of SIMPEG in BKD Diklat Kota Banjarmasin

The research method uses a qualitative approach with descriptive research types. Data was collected through documentation and interviews with three informants. Samples were determined using purposive sampling technique. Data analysis using data collection, data reduction, data display, and Conclusion Drawing/Verification.

The result of the study show that the application of SIMPEG in BKD Diklat Kota Banjarmasin has been running well but there are still some inhibiting factors in application of SIMPEG in BKD Diklat Kota Banjarmasin that must be improved in the future.

Keywords : Sistem Informasi Manajemen Kepegawain (SIMPEG), Element of Successfull Development of E-Government

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sudah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat serta kemajuan diberbagai kehidupan, termasuk dalam hal memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakatnya. Oleh karena itu, Pemerintah terus dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada sebagai bentuk upaya mendukung tugas dan fungsinya. Sehingga pemerintahan melakukan pengembangan teknologi di bidang

Administrasi Publik, salah satunya adalah dibagian Sistem Manajemen Kepegawaian yang akan berdampak pada Administrasi Kepegawaian. Dalam kegiatan administrasi kepegawaian, Pemerintah mengeluarkan *e-Government* sebagai salah satu bentuk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yang sampai saat ini terus dikembangkan. Untuk memperkuat pelaksanaan pengembangan *e-Government* di atur di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas

pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien

Bentuk pemanfaatan *ICT* di dalam *e-Government* adalah Sistem Manajemen Kepegawaian yaitu adanya *website* pemerintah dan layanan publik secara *online*. Penerapan *e-Government* di dalam pemerintah terus dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah yang baik, tersusun dan terencana. Pemanfaatan *ICT* ini agar pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.

Di buatnya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai penerapan dari *e-Government* di Indonesia karena dulu data dan laporan kepegawaian masih menggunakan tenaga manual dan banyaknya berkas fisik yang terkumpul mengenai kenaikan pangkat gaji, data diklat, dan pegawai yang dimutasi. Semua data ini harus diatur dan disusun agar mempermudah dalam menghasilkan informasi nantinya bila diperlukan. Namun, mencari data dalam bentuk fisik tidak lah mudah dengan jumlah banyaknya pegawai belum lagi pengarsipan yang kurang rapi membuat data pegawai tak tertata dan bahkan bisa hilang, karena dengan banyaknya jumlah berkas fisik tersebut membuat pemerintah malah kesusahan mencari data dan informasi pegawai jika sewaktu-waktu pemerintah mencari, aplikasi SIMPEG mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementrian Dalam Negeri. SIMPEG adalah suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengolah data, manajemen, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam jurnal (Komalasari Sulistyani, 2014) SIMPEG adalah suatu program yang dibuat dengan tujuan membantu pengelolaan informasi data kepegawaian yang valid, dan mutakhir. Hal yang sama dikemukakan oleh Davis 2002 dalam jurnal (Denaya Astri, dan Djumiati Titik, 2018:3) SIMPEG adalah sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) Kota Banjarmasin. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Website SIMPEG Kota Banjarmasin dapat di akses melalui

(<https://www.simpeg.banjarmasinkota.go.id>).

Ini mempermudah pegawai dalam mengakses data, karena dapat dilakukan dimanapun hanya memerlukan jaringan internet dan *handphone* untuk memasukan data. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang Analisis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis *Electronic Government* Di Badan Kepegawaian Daerah, Pelatihan, Dan Pendidikan Kota Banjarmasin.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan SIMPEG berbasis *e-Government* di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat aplikasi SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin?

III. FOKUS MASALAH

Penelitian ini mempertimbangkan keterbatasan peneliti baik tenaga, waktu, dan biaya maka peneliti berfokus pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis *e-Government*. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah berkenaan dengan pengembangan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin yang mengacu pada elemen sukses pengembangan *E-Government* menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* dengan indikator *support*, *capacity*, dan *value*

IV. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penerapan SIMPEG berbasis *e-Government* di Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat aplikasi SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin

V. MANFAAT PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
 - b. sebagai bahan acuan bagi peneliti lain dalam penelitian masalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
 - c. untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari Banjarmasin.

VI. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dipilihnya pendekatan ini karena untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2018:9)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain (Sugiyono, 2012:11). Dimana data-data yang didapatkan berupa peristiwa atau gejala yang dikumpulkan dalam bentuk foto, dokumen, atau catatan lapangan pada saat penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Kepegawaian Daerah yang beralamat di Jalan RE. Martadinata, No. 2, Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 7023

D. Sumber Data (*Informan*)

Menurut Sugiyono (2012:156) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Dalam penelitian ini teknik *sampling* untuk mendapatkan data primer menggunakan *Sampling Purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:96)

Dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu: Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan staf Sub Bagian Penilaian Kinerja dan staf Penilaian Kinerja dan Pola Karier

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu metode tanya jawab secara langsung terhadap *informan*. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2018:114)

2. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018:124)

F. Analisis Data

Sugiyono (2018:130) Analisis data model Miles dan Huberman ada empat tahapan pengumpulan data yaitu :

1. *Data Collection* (pengumpulan data)
Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
2. *Data Reduction* (reduksi data)
Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. *Data Display* (penyajian data)
Setelah data direduksi, maka penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.
4. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan)
Maksudnya penarikan kesimpulan adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

VII. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis *Electronic Government* Di Badan Kepegawaian Daerah, Pelatihan, Dan Pendidikan Kota Banjarmasin

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan apa saja elemen sukses dalam penerapan *e-Government* di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan (BKD Diklat) Kota Banjarmasin. Aplikasi SIMPEG dibuat agar mempermudah para pegawai untuk memasukan laporan dan data, para pegawai dapat *input* dimana saja dan aplikasi SIMPEG ini juga membantu pengarsipan data pegawai, sehingga data pegawai menjadi lebih sistematis dan rapi, dengan adanya aplikasi SIMPEG dapat memantau kinerja tiap pegawai, ini dapat digunakan sebagai salah satu cara pimpinan untuk melihat apakah seorang pegawai tersebut layak untuk mendapatkan promosi jabatan khusus, keuntungan lainnya adalah dengan adanya aplikasi SIMPEG Sasaran Kinerja Pegawai dapat dilihat dengan mudah selanjutnya juga ada penghematan penggunaan kertas, pensil, pulpen, dan *papper clip* dalam penulisan laporan dan data pegawai.

Data mengenai Analisis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis *Electronic Government* Di Badan Kepegawaian Daerah, Pelatihan, Dan Pendidikan Kota Banjarmasin, penulis menggunakan elemen sukses pengembangan *E-Government* menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* dengan indikator *support*, *capacity*, dan *value*. Dan penulis mendapatkan data dari hasil wawancara dengan informan yaitu: Kepala Sub Bagian Data dan

Informasi, staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan staf Sub Bagian Penilaian Kinerja dan staf Penilaian Kinerja dan Pola Karier

1. *Support*

Support disini adalah dukungan pemerintah dalam membantu pembangunan dan pengembangan *e-government*, dukungan disini bukan hanya kata-kata melainkan benar-benar bagaimana pelaksanaan dan pengembangan *e-government* diwujudkan dan dijalankan oleh pemerintah. Untuk mengukur kesuksesan penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin menggunakan Elemen sukses hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* (Indrajit, 2004 dalam Anggana dkk, 2015:80) memiliki 4 aspek yang digunakan dalam menentukan keberhasilan penerapan dan pengembangan *e-government* yaitu disepakatinya kerangka *e-government*, dialokasikannya SDM, infrastruktur dan suprastruktur, sosialisasi konsep *e-government*.

a. Disepakatinya Kerangka *e-Government*

Dalam penerapan *e-government* sebuah instansi harus sepakat dalam pelaksanaannya, hal ini harus disetujui oleh pimpinan dan semua pegawai agar mendapatkan hasil yang diinginkan, jangan sampai terjadi kesalahpahaman dan menguntungkan di beberapa pihak saja, dalam penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin pimpinan dan semua pegawai sepakat dalam penerapan aplikasi SIMPEG dalam tujuan mempermudah pemerintah dalam urusan data pegawai.

b. Dialokasikannya SDM

Sumber daya yang dimaksud disini bukan hanya sumber daya manusia melainkan sumber daya finansial, waktu, dan informasi,

sumber daya finansial yang dimaksud adalah dana anggaran dalam pelaksanaan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin, dan untuk sumber daya waktu dan informasi disini adalah waktu pelaksanaan pengembangan aplikasi SIMPEG dan pemberian informasi tentang aplikasi SIMPEG. Dalam penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin mereka masih kekurangan sumber daya manusia dan finansial hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa hanya dua orang saja yang mengelola aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin, dan untuk sumber daya finansial mereka kekurangan server, dan jaringan komputer untuk mengelola aplikasi SIMPEG. namun untuk sumber daya waktu dan informasi di BKD Diklat Kota Banjarmasin sudah cukup baik, untuk sumber daya waktu dalam penerapan aplikasi SIMPEG tidak ada kendala para pegawai tidak kesusahan dalam pengisian data ataupun memasukan laporan, begitupula dengan sumber daya informasi, hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi SIMPEG langsung diatur dan dikelola oleh admin aplikasi SIMPEG sehingga tidak menimbulkan masalah yang serius.

c. Infrastruktur dan Suprastruktur

Infrastruktur dan Suprastruktur menjadi salah satu faktor penting agar terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif dalam pengembangan dan pelaksanaan *e-government*. Infrastruktur yang dimaksud disini berupa jaringan komputer, server, jaringan internet, dan lainnya. Untuk suprastruktur adalah lembaga hukum yang menaungi pelaksanaan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin yaitu Peraturan Gubernur Nomor

04 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Infrastruktur dan suprastruktur di BKD Diklat Kota Banjarmasin sudah cukup baik terbukti dengan adanya server, jaringan komputer, jaringan internet dan faktor pendukung lainnya yang tersedia.

d. Sosialisasi kerangka *e-Government*

sosialisasi dilakukan agar semua pegawai diharapkan dapat memahami bagaimana tatacara penggunaan, manfaat, dan mengelola *e-government* tersebut. BKD Diklat Kota Banjarmasin juga melakukan hal yang sama agar semua pegawainya memahami sebelum penerapan aplikasi SIMPEG dan sosialisasi ini masih berjalan untuk pengembangan aplikasi SIMPEG tersebut. Sosialisasi juga dilakukan secara menyeluruh dan konsisten demi keberhasilan pengembangan dan penerapan aplikasi SIMPEG tersebut.

2. Capacity

Capacity yang dimaksud disini adalah kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan *e-government*. Kemampuan pemerintah disini akan menentukan keberhasilan dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan *e-government*. Semakin banyak kemampuan yang pemerintah berikan maka akan semakin baik pula penerapannya. Untuk mengukur kesuksesan penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin menggunakan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* ada 3 aspek dalam *Capacity* yaitu ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan

infrastruktur teknologi, ketersediaan SDM yang berkompetensi.

a. Ketersediaan Sumber Daya Finansial

Ketersediaan sumber daya finansial disini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*, dan biaya yang dikeluarkan tidaklah murah, semakin banyak alat penunjang penerapan aplikasi SIMPEG maka semakin mahal pula sumber daya finansial nya, di BKD Diklat Kota Banjarmasin masih kekurangan server dan jaringan komputer untuk mengelola aplikasi SIMPEG.

b. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan infrastruktur teknologi menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* harus mencapai 50% dalam pembangunannya, hal ini untuk menunjang pengelolaan dan penggunaan aplikasi SIMPEG semakin banyak infrastruktur teknologi maka semakin baik pula penerapannya, di BKD Diklat Kota Banjarmasin infrastruktur teknologi seperti server, jaringan komputer, dan jaringan internet memang ada namun ini belum bisa dikatakan 50% karena tetap harus ditambah jumlah unit nya agar kalau ada sesuatu dapat menggunakan perangkat lain nya.

c. Ketersediaan SDM yang Berkompetensi

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten disini maksudnya adalah orang yang mengelola aplikasi SIMPEG itu sendiri, jika orang yang mengelola aplikasi SIMPEG ini tidak berkompeten maka hal ini akan

menimbulkan masalah seperti tidak sesuaiya manfaat yang didapat/diharapkan. Di BKD Diklat Kota Banjarmasin memiliki 2 orang yang mengelola aplikasi SIMPEG dan orang yang mengelola aplikasi SIMPEG ini sangat berkompeten dikarenakan orang yang mengelola aplikasi SIMPEG adalah pegawai yang juga dibidang data dan informasi sehingga tahu hal apa saja bila terjadi masalah dalam penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin.

3. *Value*

Value disini adalah manfaat dari penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin seperti mempermudah pegawai dalam memasukan data dan laporan kerja, data pegawai menjadi aman dan sistematis, penghematan penggunaan kertas, papper clip, pulpen, dan pensil, dalam penulisan laporan, pegawai dapat mengakses dimana saja dan kapan saja, membatu pemerintah dalam melihat data dan informasi pegawai, penghematan waktu jika ingin mencari data pegawai, dan memantau bagaimana kinerja para pegawai

B. Faktor Pendukung dan penghambat penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin

1. **Faktor Pendukung**

Adapun beberapa faktor pendukung dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi sebagai salah satu faktor pendukung penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota

Banjarmasin yaitu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan sebelum dan sesudah penerapan aplikasi SIMPEG ini, hal tersebut mempermudah pegawai dalam memahami dan mempelajari tentang program aplikasi SIMPEG yang akan diterapkan nanti agar sesuai dengan petunjuk dari Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh BKD Diklat Kota Banjarmasin tentang aplikasi SIMPEG berbeda-beda tiap modul menu atau cara penggunaan juga di sosialisasikan, hal ini dilakukan BKD Diklat Kota Banjarmasin secara konsisten agar penerapan aplikasi SIMPEG berjalan dengan baik, pegawai pun bisa mengerti cara penggunaan dan manfaat dari aplikasi SIMPEG itu sendiri. Dan sosialisasi ini masih terus dilakukan demi pengembangan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin yang diikuti oleh seluruh SKPD Kota Banjarmasin.

Infrastruktur

Infrastruktur yang dimaksud dengan infrastruktur disini adalah dengan adanya jaringan internet, server, jaringan komputer dan lainnya yang terdapat di BKD Diklat Kota Banjarmasin untuk mengelola dan mengontrol aplikasi SIMPEG, infrastruktur di BKD Diklat Kota Banjarmasin sudah cukup lengkap dalam penerapan aplikasi SIMPEG ini, hal itu tentu saja sangat membantu staff yang mengelola aplikasi SIMPEG, bayangkan jika dalam penerapan *e-government* tidak ditunjang dengan infrastruktur teknologi, maka tidak akan ada yang bisa menerapkan pembangunan dan pengembangan *e-government*.

c. **Suprastruktur**

Suprastruktur yang dimaksud dengan suprastruktur disini adalah

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin mengikuti Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar penerapan aplikasi SIMPEG, hal ini tentu saja penting karena jika tidak ada hukum yang mendasari penerapan aplikasi SIMPEG ini bagaimana bisa dilaksanakannya penerapan aplikasi SIMPEG ini oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, maka semua penerapan, tata cara/prosedur harus di dasari dengan hukum yang berlaku.

Pelaksana Kkan

Pelaksana kebijakan disini adalah sangat terbantu dengan adanya penerapan aplikasi SIMPEG ini, karena sangat menguntungkan pimpinan dan pegawai seperti pengarsipan data, memudahkan pencarian data pegawai, penghematan pembelian alat tulis, data yang didapat akurat dan cepat, dapat diakses dimana saja oleh pegawai yang ingin memasukan data, dan juga sebagai bahan acuan pimpinan dalam mengambil keputusan. Penerapan aplikasi SIMPEG ini juga sudah sesuai dengan petunjuk.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mengelola aplikasi SIMPEG di BKD Diklat kota Banjarmasin hanya dua orang, yaitu dari Sub Bidang Data dan Informasi, pihak dari BKD Diklat pun mengatakan

bahwa mereka sedang kekurangan SDM karena pemindahan anggota sebelumnya yang beberapa adalah pengelola aplikasi SIMPEG, padahal sumber daya manusia ini salah satu faktor yang penting, karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkompentensi dibidangnya akan memudahkan dalam pelaksanaan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin. Percuma saja jika banyak infrastruktur teknologi tetapi tidak ada sumber daya manusia yang mengaplikasikanya maka hal ini akan sia-sia. Sumber daya manusia ini juga mempermudah dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan, karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkompentensi maka pelaksanaan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin akan berjalan lancar dan baik.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran dimana faktor ini sangat penting dan paling berpengaruh, karena di BKD Diklat Kota Banjarmasin masih kekurangan anggaran dalam pembelian infrastruktur teknologi seperti server, jaringan komputer dan internet, padahal anggaran ini akan menunjang keberhasilan dalam penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin, karena dana anggaran tersebut akan di gunakan untuk penambahan jumlah infrastruktur teknologi yang ada. Semakin banyak infastruktur teknologi yang ada maka akan semakin cepat pula kinerja pegawai dalam mengelola data pegawai, dana anggaran juga bisa digunakan untuk pengupdatean server jaringan komputer agar pengembangan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin semakin cepat dan berjalan dengan baik.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui dan disimpulkan bahwa :

1. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin berdasarkan Elemen Sukses Pengembangan *E-Government* menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dengan indikator *support*, *capacity*, dan *value*, sudah berjalan dengan cukup baik
2. Dalam penerapan aplikasi SIMPEG di BKD Diklat Kota Banjarmasin ada beberapa faktor pendukung yaitu seperti komunikasi, infrastruktur, suprastruktur, dan pelaksana kebijakan yang baik oleh BKD Diklat Kota Banjarmasin. Untuk faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial kurangnya anggaran di BKD Diklat Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indrajit, Eko Richardus. 2004. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan*

pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknolgi Digital. Yogyakarta: Andi Offset

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2018. *Metode penelitian Kualitatif*. Edisi Tiga. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.